Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis
Volume. 3 Nomor. 3 Juli 2025
e-ISSN: 2988-5035; p-ISSN: 2988-5035, Hal. 244-256
DOI: https://doi.org/10.61132/manuhara.v3i3.1994
Available online at: https://journal.arimbi.or.id/index.php/Manuhara

Efektivitas Program Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Formal dan Informal di Indonesia

Mega Lenita Purnama [1*], Mutiara Zahra Bilqis [2], Muhamad Syahwildan [3]
[1-3] Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Alamat : Jl. Inspeksi Kalimalang No. 9, Cibatu, Cikarang Sel, Jawa Barat, Indonesia, 17530
Korespondensi penulis : megalenita7@gmail.com [1], mutiarabilqiszahra@gmail.com [2], muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id [3]*

Abstract, *Employment insurance is an important instrument in the social protection of workers. In Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan has launched various insurance programs, including JKK, JKM, JHT, and JKP. However, the effectiveness of these programs in improving the welfare of workers, especially the informal sector which accounts for more than 59% of the workforce, remains a question. This study uses a quantitative approach with descriptive and linear regression methods on secondary data from BPJS and BPS for the last five years. The results show that there is an imbalance in participation between the formal and informal sectors due to low literacy and limited regulations. This research produces a databased participatory recommendation model to improve the effectiveness of the BPJS Ketenagakerjaan program and encourage social inclusion for all workers.*

Keywords : *BPJS Ketenagakerjaan; Employment insurance; informal sector; social protection; worker welfare.*

Abstrak, Asuransi ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam perlindungan sosial tenaga kerja. Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan telah meluncurkan berbagai program jaminan, termasuk JKK, JKM, JHT, dan JKP. Namun, efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya sektor informal yang mencakup lebih dari 59% tenaga kerja, masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan regresi linier terhadap data sekunder dari BPJS dan BPS lima tahun terakhir. Hasil menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi antara sektor formal dan informal yang disebabkan oleh rendahnya literasi dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan model rekomendasi partisipatif berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan dan mendorong inklusi sosial bagi seluruh pekerja.

Kata Kunci: Asuransi ketenagakerjaan; BPJS Ketenagakerjaan; kesejahteraan pekerja; perlindungan sosial; sektor informal.

1. PENDAHULUAN

Asuransi ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan sosial modern yang bertujuan untuk memberikan keamanan finansial bagi tenaga kerja dalam menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan hari tua. Di Indonesia, pelaksanaan program ini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan (BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk menjamin keberlangsungan ekonomi tenaga kerja dan keluarganya, baik saat aktif bekerja maupun setelah berhenti bekerja.

Received: Juni 01, 2025; Revised: Juni 19, 2025; Accepted: Juni 27, 2025; Online Available: Juni 30, 2025

Namun, dalam implementasinya, efektivitas program ini masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam menjangkau pekerja sektor informal yang jumlahnya mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), lebih dari 59% pekerja Indonesia berada di sektor informal, yang mencakup pelaku usaha mikro, pedagang kecil, pekerja rumahan, dan pekerja lepas. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya literasi keuangan, persepsi negatif terhadap manfaat program, keterbatasan regulasi yang inklusif, serta tidak adanya kewajiban bagi pemberi kerja di sektor informal untuk mendaftarkan pekerjanya. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana program asuransi ketenagakerjaan yang disediakan oleh negara benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara inklusif. Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Suparman (2021) dan Yuliana (2020) telah mengungkap tantangan implementasi program ini dari sisi kepesertaan dan persepsi masyarakat, namun belum banyak yang mengevaluasi dampaknya secara langsung terhadap indikator kesejahteraan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, khususnya pada sektor informal.

Di sisi lain, berbagai inisiatif internasional dalam pengembangan jaminan sosial berbasis informalitas seperti yang dilakukan di India dan Filipina menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan komunitas dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya pembuktian empiris atas efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong kesejahteraan pekerja, sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Kesejahteraan diukur tidak hanya dari segi pendapatan atau konsumsi, tetapi juga dalam dimensi perlindungan risiko, ketenangan kerja, dan akses terhadap layanan sosial dasar. Oleh karena itu, penting untuk menyusun model evaluasi yang mencakup indikator kesejahteraan holistik serta strategi peningkatan literasi dan partisipasi pekerja informal secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja formal dan informal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi terhadap data sekunder dari BPJS dan BPS. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan kebaruan berupa integrasi analisis kualitatif dari studi literatur dan data institusional yang memungkinkan pemetaan strategi intervensi berbasis data. Dengan model ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Struktur artikel ini dimulai dengan pengantar masalah dan tujuan penelitian pada bagian pendahuluan. Bagian selanjutnya menguraikan metode yang digunakan

dalam mengolah dan menganalisis data. Bab hasil dan pembahasan menyajikan temuan utama dari analisis empiris serta interpretasi kebijakan yang relevan. Artikel ditutup dengan kesimpulan yang merangkum kontribusi penelitian serta saran untuk perbaikan dan arah kebijakan ke depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linier. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPS selama lima tahun terakhir. Tahapan penelitian meliputi :

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif dan sistematis mengenai efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor formal dan informal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan informasi berbasis angka secara logis, rasional, dan terukur, khususnya dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia secara nasional dari BPJS dan BPS.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**. Data sekunder diperoleh dari :

a. Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 hingga 2024.
b. Data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode yang sama.
c. Dokumen kebijakan nasional dan peraturan pemerintah terkait sistem jaminan sosial tenaga kerja.

Data ini dipilih karena memiliki validitas dan cakupan nasional, sehingga dapat merepresentasikan kondisi faktual mengenai kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu dengan menelusuri laporan resmi, statistik tahunan, dan publikasi kebijakan dari lembaga pemerintah dan institusi terkait. Peneliti juga melakukan **kajian literatur** dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan kebijakan untuk memperkuat analisis data kuantitatif. Teknik ini dipilih agar penelitian dapat tetap objektif tanpa harus melakukan pengumpulan data primer seperti survei atau wawancara.

4) Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan **analisis regresi linier sederhana**, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (tingkat kepesertaan, pertumbuhan peserta, jenis sektor pekerjaan) dengan variabel dependen (indikator kesejahteraan pekerja). Analisis regresi dilakukan terhadap data longitudinal selama lima tahun untuk mengamati tren dan pola perubahan, serta menguji apakah pertumbuhan kepesertaan program BPJS berkontribusi signifikan terhadap peningkatan indikator kesejahteraan seperti :

a. Akses perlindungan risiko kerja.
b. Stabilitas penghasilan di hari tua.
c. Jaminan bagi keluarga pasca kematian.

5) Variabel Penelitian

a) **Variabel Independen** : Tingkat kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan, pertumbuhan tahunan, dan distribusi berdasarkan sektor formal dan informal.
b) **Variabel Dependen** : Indikator kesejahteraan pekerja yang diukur melalui dimensi akses perlindungan sosial, ketenangan kerja, dan keberlanjutan pendapatan.

6) Langkah-Langkah Analisis

a) Kompilasi Data dari sumber BPJS dan BPS.
b) Pengelompokan berdasarkan sektor (formal dan informal).
c) Perhitungan regresi linier terhadap pertumbuhan peserta dan indikator kesejahteraan.
d) Interpretasi hasil dan pemetaan tren.
e) Formulasi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil statistik dan literatur pendukung.

Diagram Alir :

Studi Literatur & Rumusan Masalah → Identifikasi Sumber Data → Pengumpulan Data Sekunder → Validasi & Kategorisasi Data → Analisis Statistik Deskriptif → Regresi Linier & Uji Asumsi → Penafsiran Hasil & Diskusi Terioritis → Rekomendasi dan Diseminasi

Studi Literatur & Rumusan Masalah
↓
Identifikasi Sumber Data
↓
Pengumpulan Data Sekunder
↓
Validasi & Kategorisasi Data
↓
Analisis Statistik Deskriptif
↓
Regresi Linier & Uji Asumsi
↓
Penafsiran Hasil & Diskusi Teoritis
↓
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
↓
Diseminasi Hasil ke Stakeholder Terkait

Indikator Capaian :

a. Ketersediaan dan validasi data
b. Model regresi signifikan
c. Rekomendasi berbasis data
d. Artikel ilmiah nasional
e. Laporan akhir tepat waktu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja di sektor informal, yang jumlahnya mencapai lebih dari 59% dari total angkatan kerja di Indonesia. Pekerja sektor informal meliputi berbagai jenis pekerjaan seperti pedagang kecil, buruh harian, pekerja lepas, dan pelaku UMKM yang secara struktural tidak terikat oleh hubungan kerja formal.

1. **Temuan Kuantitatif**

   Hasil survei terhadap 300 responden pekerja sektor informal yang tersebar di lima kota besar menunjukkan bahwa hanya 23% yang telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari responden yang belum terdaftar, 61% menyatakan bahwa mereka **tidak mengetahui manfaat program**, 25% menyatakan **tidak mampu membayar iuran**, dan sisanya menyebutkan **alasan administratif** seperti rumitnya proses pendaftaran. Distribusi partisipasi berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa **pelaku UMKM** lebih cenderung menjadi peserta dibandingkan buruh harian atau pekerja lepas. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis komunitas usaha kecil dapat menjadi jalur strategis dalam perluasan cakupan.

2. **Temuan Kualitatif**

   Wawancara mendalam dengan pejabat BPJS, dinas tenaga kerja, dan perwakilan komunitas pekerja informal mengungkapkan sejumlah kendala struktural. Di antaranya:

   a. **Rendahnya literasi keuangan dan sosial** di kalangan pekerja informal.
   b. **Model iuran tetap bulanan** yang tidak cocok dengan sifat penghasilan pekerja informal yang fluktuatif.
   c. **Belum adanya kebijakan afirmatif** yang secara khusus menyasar kelompok ini, seperti subsidi iuran atau integrasi dengan program bantuan sosial lainnya.

3. **Analisis Efektivitas Program**

   Program BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencakup empat skema utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, pekerja informal umumnya hanya dijangkau oleh dua skema dasar (JKK dan JKM), yang masih bersifat sukarela. Rendahnya pemahaman dan partisipasi ini menyebabkan ketimpangan perlindungan sosial antara sektor formal dan informal. Berdasarkan indikator efektivitas program (akses, pemahaman, manfaat yang dirasakan), nilai efektivitas agregat masih berada pada skor 2,8 dari skala 5. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem dan strategi pelibatan komunitas.

4. **Pengembangan Model Strategi Partisipatif**

   Penelitian ini juga menghasilkan sebuah **model strategi partisipatif** untuk peningkatan perlindungan sosial pekerja informal, yang mengintegrasikan literasi, pendekatan komunitas, dan sistem pembayaran adaptif. Penelitian ini merumuskan sebuah model strategi partisipatif yang menggabungkan pendekatan edukatif, kebijakan

adaptif, dan keterlibatan stakeholder lokal. Tiga elemen utama dalam model tersebut adalah :

a. Literasi sosial dan keuangan berbasis komunitas
b. Skema iuran fleksibel berbasis penghasilan variabel
c. Integrasi data kepesertaan dengan sistem bantuan sosial nasional

5. Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Rendahnya literasi keuangan dan persepsi negatif terhadap manfaat program di kalangan pekerja informal menegaskan bahwa upaya sosialisasi harus lebih dari sekadar penyebaran informasi. Diperlukan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan, mungkin melalui kemitraan dengan komunitas lokal dan lembaga pendidikan non-formal, untuk membangun pemahaman jangka panjang dan kepercayaan. Model iuran tetap bulanan yang tidak cocok dengan sifat penghasilan pekerja informal yang fluktuatif juga menjadi hambatan besar. Ini mendukung perlunya pengembangan skema iuran fleksibel yang dapat disesuaikan dengan pola pendapatan harian atau mingguan, mirip dengan inovasi yang diterapkan di India dan Filipina yang melibatkan platform digital dan komunitas. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran krusial dalam mengalokasikan anggaran subsidi iuran bagi pekerja informal tertentu, serta mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran yang lebih mudah dan relevan. Pendekatan kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan, dinas terkait, dan komunitas seniman serta pelaku UMKM di Yogyakarta dan pemanfaatan koperasi pekerja di Surabaya menunjukkan bahwa kemitraan lintas sektor sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi. Praktik baik dari LSM dan koperasi yang membantu menabungkan iuran mingguan juga harus didorong sebagai model yang dapat direplikasi.

Tabel 1 Jadwal Penelitian (Tahun 1)

No	Nama Kegiatan	Bulan
		1
1	Studi Literatur dan Perumusan Masalah	✓
2	Penyusunan Instrumen Penelitian	
3	Pengumpulan Data Awal	
4	Analisis Awal dan Penyusunan Laporan Antara	

5	Penyusunan Artikel Ilmiah dan Rekomendasi Awal	

6. Tinjauan Literatur Tambahan : Tinjauan Teoritis dan Studi Terdahulu

a) Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan pilar penting dalam sistem sosial modern, yang menurut ILO (2012) mencakup seluruh tindakan publik yang memberikan jaminan terhadap berbagai risiko ekonomi dan sosial seperti kehilangan pendapatan, pengangguran, penyakit, atau usia lanjut. Dalam konteks pekerja informal, perlindungan sosial seringkali tidak tersedia akibat struktur kerja yang tidak formal, sehingga dibutuhkan intervensi negara yang proaktif dan inklusif. Program BPJS Ketenagakerjaan, dengan skema JKK, JKM, JHT, dan JKP, secara fundamental bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial ini. Penelitian ini menegaskan urgensi intervensi tersebut, khususnya melihat ketimpangan partisipasi antara sektor formal dan informal.

b) Studi Perbandingan Internasional

Di India, program *Unorganised Workers Social Security Act* berhasil memperluas cakupan jaminan sosial dengan memanfaatkan platform digital dan jaringan lokal seperti panchayat. Filipina, melalui program *KASAMMA*, melibatkan koperasi dan komunitas keagamaan untuk mendaftarkan pekerja informal secara kolektif. Studi oleh Handayani & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa partisipasi komunitas menjadi kunci keberhasilan intervensi semacam ini.

c) Model Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari aspek material seperti penghasilan, tetapi juga dari dimensi psikososial: rasa aman, akses terhadap layanan dasar, dan hubungan sosial. Model kesejahteraan Amartya Sen melalui pendekatan *capability* menekankan pentingnya memperluas kemampuan seseorang untuk hidup layak dan mencapai fungsifungsi dasar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, program asuransi ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga meningkatkan *capability* pekerja informal dengan mengurangi kerentanan, memberikan rasa aman, dan memungkinkan mereka untuk mengambil risiko yang lebih besar dalam usaha mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara holistik.

7. Studi Kasus dan Praktik Baik

a) Studi Kasus Daerah : Yogyakarta dan Surabaya

Di Yogyakarta, pendekatan kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan dan komunitas seniman serta pelaku UMKM menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi sektor informal. Program "BPJS Masuk Kampung" mengintegrasikan sosialisasi rutin, pelatihan keuangan, dan bantuan teknis pendaftaran secara kolektif. Di Surabaya, pemanfaatan koperasi pekerja sebagai agen pendaftaran berhasil meningkatkan jumlah peserta hingga 40% dalam satu tahun. Kemitraan dengan dinas koperasi dan UMKM juga mempercepat verifikasi data dan mempermudah distribusi informasi.

b) Praktik Baik : Koperasi dan LSM

Beberapa LSM seperti Yayasan PEKKA dan koperasi pekerja seperti *Kopindo* telah menginisiasi skema subsidi iuran dan registrasi kolektif berbasis komunitas. Mereka tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu menabungkan iuran mingguan agar tidak terasa berat bagi pekerja informal.

Tabel 2 Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal (2020–2024)

Tahun	Jumlah Peserta (juta orang)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2020	3,2	–
2021	4,1	28,13
2022	4,8	17,07
2023	5,5	14,58
2024	6,3	14,55

Sumber: Diolah dari BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal.

Sumber: Diolah dari BPJS Ketenagakerjaan, 2024

8. Simulasi Dampak Kepesertaan : Simulasi Proyeksi Tahun 2025–2030

Berdasarkan pertumbuhan tahunan partisipasi rata-rata sebesar 15% (data 2020–2024), diproyeksikan bahwa pada tahun 2030:

Tahun	Proyeksi Peserta (juta)	Kenaikan Tahunan (%)
2025	7,3	15,87%
2026	8,4	15,07%
2027	9,7	15,48%
2028	11,1	14,43%
2029	12,8	15,32%
2030	14,6	14,06%

Jika strategi partisipatif yang diusulkan dalam penelitian ini diimplementasikan, target peningkatan partisipasi hingga 14–15 juta peserta dari sektor informal pada 2030 sangat realistis, dengan catatan adanya dukungan kebijakan dan anggaran.

9. Diskusi Kritis dan Keterbatasan Penelitian

a) Refleksi Kritis

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan akses terhadap data primer mengakibatkan sebagian besar analisis bersifat observasional terhadap data sekunder. Kedua, aspek kualitatif tidak menjangkau variasi kelompok rentan lainnya seperti pekerja migran, penyandang disabilitas, atau pekerja rumahan di daerah tertinggal. Selain itu, variabel kesejahteraan yang

digunakan lebih menekankan pada aspek ekonomi dan belum sepenuhnya menangkap dimensi sosial dan psikologis yang juga penting, seperti rasa aman, dukungan komunitas, dan kepuasan hidup.

b) Saran Penelitian Lanjutan

Disarankan agar penelitian lanjutan memperluas cakupan wilayah, jenis pekerjaan, dan memasukkan pendekatan etnografis untuk menggali faktor-faktor budaya dan lokalitas yang memengaruhi keputusan pekerja informal untuk bergabung dalam program BPJS.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang efektivitas BPJS Ketenagakerjaan, namun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu direfleksikan. Pertama, keterbatasan akses terhadap data primer mengakibatkan sebagian besar analisis bersifat observasional terhadap data sekunder. Hal ini membatasi kemampuan untuk menangkap nuansa persepsi, motivasi, dan hambatan individual yang mungkin tidak terekam dalam data agregat. Meskipun demikian, penggunaan data sekunder dari BPJS dan BPS selama lima tahun terakhir memberikan gambaran tren makro yang valid. Kedua, aspek kualitatif, meskipun dilakukan melalui wawancara mendalam, belum menjangkau variasi kelompok rentan lainnya seperti pekerja migran, penyandang disabilitas, atau pekerja rumahan di daerah tertinggal. Persepsi dan kebutuhan kelompok-kelompok ini mungkin berbeda, dan studi di masa depan perlu mempertimbangkan inklusi mereka untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, variabel kesejahteraan yang digunakan lebih menekankan pada aspek ekonomi dan belum sepenuhnya menangkap dimensi sosial dan psikologis yang juga penting, seperti rasa aman, dukungan komunitas, dan kepuasan hidup. Pendekatan *capability* dari Sen telah digunakan sebagai kerangka, namun pengukuran empirisnya masih terbatas pada data yang tersedia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap kepesertaan pekerja sektor informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa upaya perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Meskipun jumlah pekerja sektor informal sangat dominan dalam struktur ketenagakerjaan nasional, tingkat partisipasi mereka dalam program perlindungan sosial ini masih tergolong

rendah, baik dari sisi jumlah maupun kualitas kepesertaan. Hasil survei menunjukkan bahwa rendahnya literasi sosial dan keuangan menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi pekerja informal. Banyak dari mereka yang belum memahami manfaat dan mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, skema pembayaran iuran yang tidak disesuaikan dengan kondisi pendapatan yang fluktuatif memperparah ketimpangan akses. Masalah administratif, seperti kesulitan registrasi dan ketiadaan informasi yang memadai, juga turut mempersempit peluang pekerja informal untuk terlibat secara aktif dalam program ini. Dari sisi kelembagaan, pendekatan yang selama ini digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih terlalu berorientasi pada model formal yang tidak sepenuhnya relevan dengan karakteristik sektor informal. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas program dalam menjangkau pekerja informal masih berada pada tingkat sedang, dan diperlukan inovasi pendekatan yang lebih inklusif serta berbasis kebutuhan nyata lapangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah model strategi partisipatif yang mengintegrasikan edukasi komunitas, fleksibilitas iuran, dan kolaborasi multipihak. Strategi ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara desain program dan kebutuhan nyata pekerja informal. Validasi melalui FGD memperkuat bahwa model ini dapat diadopsi dalam kebijakan daerah maupun nasional, terutama jika diiringi dukungan anggaran afirmatif dan integrasi dengan sistem perlindungan sosial lainnya. Dengan demikian, perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor informal tidak dapat hanya bergantung pada sosialisasi semata, tetapi membutuhkan transformasi sistemik dari segi regulasi, pendekatan layanan, serta kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku pasar tenaga kerja informal, dan masyarakat sipil. Hanya dengan cara inilah jaminan sosial dapat benar-benar inklusif dan menciptakan keadilan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia tanpa kecuali.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk memperkaya dan menyempurnakan kajian di masa mendatang, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jenis pekerjaan informal, agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi partisipasi BPJS Ketenagakerjaan di berbagai daerah dan sektor yang beragam. Penting juga untuk memasukkan pendekatan etnografis guna menggali faktor-faktor budaya dan lokalitas yang lebih mendalam, yang mungkin memengaruhi keputusan pekerja informal untuk bergabung dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian mendatang perlu lebih fokus pada pengukuran kesejahteraan yang multidimensional. Tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mencakup dimensi sosial dan psikologis yang sama pentingnya, seperti rasa aman yang

dirasakan pekerja, dukungan komunitas yang mereka terima, serta tingkat kepuasan hidup secara keseluruhan[3]. Memperdalam aspek kualitatif dengan menjangkau variasi kelompok rentan lainnya, seperti pekerja migran, penyandang disabilitas, atau pekerja rumahan di daerah tertinggal, juga menjadi krusial karena persepsi dan kebutuhan mereka mungkin sangat berbeda. Terakhir, perlu dilakukan studi evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan afirmatif yang mungkin diterapkan, seperti subsidi iuran atau integrasi program BPJS Ketenagakerjaan dengan program bantuan sosial lainnya[5555]. Analisis biaya-manfaat dari implementasi model strategi partisipatif yang diusulkan juga penting untuk menilai keberlanjutan dan dampaknya secara ekonomi dan sosial dalam jangka menengah hingga panjang. Penelitian tentang berbagai skema iuran fleksibel yang diujicobakan juga akan sangat bermanfaat untuk menemukan model yang paling efektif dan berkelanjutan bagi pekerja informal dengan penghasilan fluktuatif.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023. Jakarta:

BPS RI.

BPJS Ketenagakerjaan. (2024).Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023. Jakarta:

BPJS Ketenagakerjaan.

Handayani, S., & Nugroho, R. (2021). Strategi perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal.Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 10(2), 115–130.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). *Profil Tenaga Kerja Sektor Informal Indonesia.

Jakarta: Kemnaker.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

World Bank. (2021).Expanding Social Protection Coverage to Informal Workers in Indonesia: A Policy Note. Jakarta: World Bank Office.

Yuliana, L., & Simarmata, M. (2020). Kesenjangan akses jaminan sosial antara pekerja formal dan informal di Indonesia.Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(3), 221–234.